



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KEBUPATEN PASAMAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2023, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Disamping itu, Laporan ini juga dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2024
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP.19830415 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Gambaran Umum.....	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
4. Kepegawaian.....	4
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	6
BAB III HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN OPD	9
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	26
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	26
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	29
BAB V PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

1. **Gambaran Umum Satpol PP dan Damkar**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermartabat perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, sehingga diperlukan pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat kabupaten Pasaman.

Salah satu lembaga yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP.

Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peran Satpol PP dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

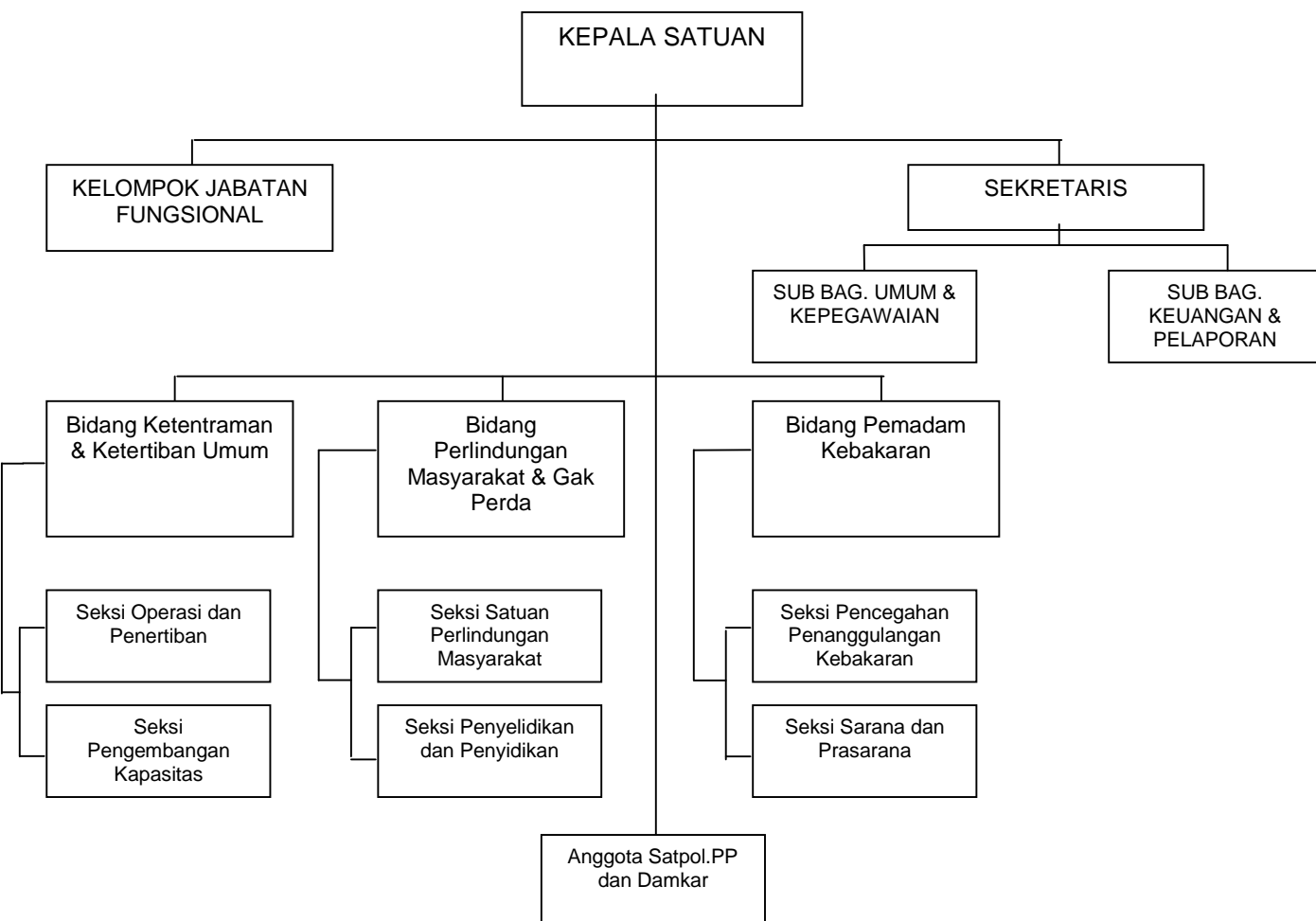
Selanjutnya payung hukum untuk mengatur keberadaan Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, antara lain disebutkan kewenangan Satpol PP adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah. Serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Penertiban.
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepegawaian

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman dengan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 5 (lima) orang Kasi, 18 (delapan belas) orang staf PNS dengan posisi tingkat eselonnya sebagai berikut :

- 1 orang menjabat Eselon II.b
- 1 orang menjabat Eselon III.a
- 3 orang menjabat Eselon III.b
- 7 orang menjabat Eselon IV.a

Sumber daya manusia pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman dapat digambarkan berdasarkan jabatan, pendidikan formal dan yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman

No	NAMA	L / P	JABATAN	Gol./ Pangkat	PENDI DIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A. STRUKTURAL						
1.	AAN AFRINALDI, S.STP	L	Kepala Satpol. PP dan Damkar	IV/b Pembina Tingkat I	DIV Pemerintahan	PIM III
2.	APRIALDI SAID, SH	L	Sekretaris	IV/b Pembina Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	PIM III
3.	ZULFAHMI, SH	L	Kabid Tibumtranmas	IV/a Pembina	S1 Ilmu Hukum	PIM IV
4.	ETRIWALDI, SH	L	Kabid Damkar	IV/a Pembina	S1 Ilmu Hukum	PIM III
5.	ZULBAHAR, SH	L	Kabid Linmas dan Gak Perda	IV/a Pembina	S1 Ilmu Hukum	-
6.	ZUL ASMAR, SH	L	Kasi Sarana dan Prasarana	III/d Penata Tk. I	S1 Ilmu Hukum	-
7.	SUETNI FELLY YONRA, SH	L	Kasi Satlinmas	III/c Penata	S1 Ilmu Hukum	-
8.	ASTUTI, SH	P	Kasi Bangpas	III/c Penata	S1 Ilmu Hukum	-
9.	HENDRA FAUZI, SE	L	Kasubag Keuangan & Evalop	III/c Penata	S1 Ilmu Ekonomi	
10.	TEGUH SETIA HIDAYATULLAH, S.STP	L	Kasi Ops & Penertiban	III/c Penata	S1 Ilmu Pemerintahan	-
11.	YUZA DWANSYAH, S.STP	L	Kasubag Umum & Kepegawaian	III/b Penata Muda Tk. I	D-IV Politik Pemerintahan	-
12.	BAYU MATIO KARDO, SH	L	Kasi Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran	III/b Penata Muda Tk. I	S1 Ilmu Hukum	-
13.	FIRMAN, SH	L	Pranata Pemadam Kebakaran	III/b Penata Muda Tk. I	S1 Ilmu Hukum	-
14.	DEDY TRI MULYA	L	Pengadministrasian Umum	III/a Penata Muda	SLTA	-
15.	EDIMON VICTER	L	Pranata Perlindungan Masyarakat	III/a Penata Muda	SLTA	-
16.	M. RIZAL LUBIS	L	Teknis Sarana dan Prasarana	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
17.	DODI ERIANTO	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
18.	YAUMIL AKBAR	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-

19.	DIFLIZAR	L	Teknis Sarana dan Prasarana	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
20.	SYAFRIL	L	Komandan Petugas Keamanan	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
21.	HENDRI	L	Pengadministrasian Umum	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
22.	ANRIZAL	L	Komandan Petugas Keamanan	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
23.	EVISON	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/b Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-
24.	ZAINAL	L	Petugas Keamanan	II/a Pengatur Muda	SLTP	-
25.	GUSRINAL	L	Pramu kebersihan	I/d Juru Tingkat I	SD	-
26.	FERDI JUNIANTO, SH	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	S1 Ilmu Hukum	-
27.	YULIARDI. R	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
28.	HIDAYAT	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
29.	DENI AGUSMAL	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
30.	GILANG RAMADHAN	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	S1 Ilmu Hukum	-

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Satpol. PP dan Damkar sebelum dan sesudah perubahan tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pajak Daerah	80.000.000	80.000.000
2.	Retribusi Daerah	3.320.000	3.320.000
JUMLAH		83.320.000	83.320.000

Realisasi Pendapatan Daerah Satpol. PP dan Damkar pada tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target PAD	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	80.000.000	82.582.271	103,23
2.	Retribusi Daerah	3.320.000	3.899.500	117,45
JUMLAH		83.320.000	86.481.771	103,79

2.2 Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan Tahun 2023

Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan Satpol. PP Dan Damkar sebelum dan sesudah perubahan tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.3
Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/sub kegiatan/kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.503.290.830	4.962.290.459
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.867.500	10.867.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.867.500	5.867.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.789.704.722	2.942.747.751
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.667.304.722	2.822.787.751
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.400.000	119.960.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.820.000	156.820.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	156.000.000	156.000.000

	Atribut Kelengkapannya		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	820.000	820.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.636.700	156.439.300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000	5.060.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.776.500	10.776.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000	16.889.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.195.000	3.195.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.605.200	120.518.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	3.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.300.081.908	1.555.235.908
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.481.908	38.481.908
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.261.600.000	1.516.754.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.180.000	137.180.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.000.000	123.000.000
	Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.680.000	2.680.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	606.990.700	875.277.600
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	537.558.100	796.639.000
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	376.059.100	550.271.200
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	30.772.500	30.772.500
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	41.500.000	127.196.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.000.000	37.100.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	28.375.000	49.960.300

	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	24.851.000	1.839.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	69.432.600	78.638.600
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	2.400.000	1.640.000
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	30.532.600	37.498.600
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	36.500.000	39.500.000
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	509.773.100	736.713.100
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.734.000	692.664.000
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	29.720.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	407.551.000	632.491.000
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	15.000.000	9.270.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	21.183.000	21.183.000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.765.000	12.765.000
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.765.000	12.765.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	20.000.000	13.010.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	20.000.000	13.010.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	18.274.100	18.274.100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5.775.000	5.775.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	12.499.100	12.499.100

Alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satpol. PP dan Damkar tahun 2023 adalah 3 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Realisasi belanja daerah serta realisasi program dan kegiatan Satpol. PP dan Damkar tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.4
Realisasi Belanja Daerah serta Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Urusan / Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.952.500,-	99,05
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.867.500,-	5.840.000,-	99,53
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.787.751,-	2.734.934.622,-	96,89
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.960.000,-	102.160.000,-	85,16
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156.000.000,-	153.830.600,-	98,61
		b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	820.000,-	0,-	0
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000,-	4.907.000,-	96,98
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.776.500,-	10.588.500,-	98,26
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.889.000,-	16.720.000,-	99,00
		d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.195.000,-	2.880.000,-	90,14
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.518.800,-	118.277.276,-	98,14

		SKPD			
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,-	2.500.000,-	83,33
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.481.908,-	12.412.400,-	32,26
		b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.754.000,-	1.489.343.156,-	98,19
		7. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.000.000,-	117.504.450,-	95,53
		b. Pemeliharaan Mebel	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.680.000,-	990.000,-	36,94
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,-	9.952.000,-	99,52
II	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,	550.271.200,-	546.076..000,-	99,24

		pengamanan dan pengawalan			
		b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	30.772.500,-	30.597.750,-	99,43
		c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	127.196.000,-	57.921.500,-	45,54
		d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.100.000,-	36.549.000,-	98,51
		e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Plekasanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	49.460.300,-	47.986.950,-	97,02
		f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1.839.000,-	1.500.500	81,59
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				
		a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.640.000,-	1.630.200,-	99,40
		b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	37.498.600,-	37.455.100,-	99,88
		c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	39.500.000,-	38.859.500,-	98,38

III	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	29.720.000,-	26.462.250,-	89,04
		b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	632.491.000,-	589.894.000,-	93,27
		c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	9.270.000,-	4.844.000,-	52,25
		d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	21.183.000,-	14.834.300	70,03
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
		a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.765.000,-	10.954.000,-	85,81
		3. Investigasi Kejadian Kebakaran			
		a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	13.010.000,-	12.007.500,-	92,29
		4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
		a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5.775.000,-	213.000,-	3,69
		b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	12.499.100,-	10.427.000,-	83,42

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran Satpol. PP dan Damkar setelah perubahan tahun 2023 adalah Rp.6.257.505.054 dengan persentase keuangan 95,18 %. Dengan pagu yang telah terealisasi Satpol. PP dan Damkar telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik meskipun ada sub kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mesti karena ada pengurangan anggaran.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Satpol. PP dan Damkar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	30 kasus	30 kasus	100 %	
2.	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	20 kasus	20 kasus	100 %	
3.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50 dokumen	50 dokumen	100 %	
4.	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62 dokumen	62 dokumen	100 %	
5.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan	50 orang	30 orang	60 %	

	Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
6.	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	30 laporan	5 laporan	16 %
7.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda /Perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku/ usaha	1 laporan	1 laporan	100 %
8.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 laporan	20 laporan	100 %
9.	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	55 laporan	55 laporan	100 %
Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan non Kebakaran serta Penyelamatan				
10.	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	35 dokumen	35 dokumen	100 %
11.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100 %
12.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	12 dokumen	100 %
13.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 keluarga	20 keluarga	100 %
14.	Jumlah dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	25 dokumen	25 dokumen	100 %

15.	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	30 dokumen	30 dokumen	100 %
16.	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	40 orang	15 orang	37 %
17.	Jumlah nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	40 orang	40 orang	100 %

3.1.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja program dan kegiatan dituangkan pada tabel dibawah ini:

Satpol. PP dan Damkar tahun 2023 adalah 3 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.6.574.281.159 telah terealisasi sebesar Rp. 6.257.505.054 dengan persentase keuangan 95,18 % dan persentase fisik 99,62 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.952.500,- presentase realisasi anggaran sebesar 99,05% dan realisasi fisik 99,60%. Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah : RKA, DPA, RENJA dan RENSTRA
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.867.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.840.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 99,53% dan realisasi fisik 100%. Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan laporan tahunan pada Satpol. PP dan Damkar

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.822.787.751,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.734.934.622,- presentase realisasi anggaran sebesar 96,89% dan realisasi fisik 100% untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dianggarkan dana sebesar Rp. 119.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.160.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 85,16% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Dianggarkan dana sebesar Rp. 156.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 153.830.600,- presentase realisasi anggaran sebesar 98,61% dan realisasi fisik 100% terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk Pol. PP dan Damkar beserta atribut kelengkapan sebanyak 153 stel.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dianggarkan dana sebesar Rp. 820.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- presentase realisasi anggaran sebesar 0,-% dan realisasi fisik 0%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.907.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 96,98% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan komponen atau alat-alat listrik untuk kebutuhan kantor.

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dianggarkan dana sebesar Rp. 10.776.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.588.500,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,26% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor berupa atk.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dianggarkan dana sebesar Rp. 16.889.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.720.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 99,00% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan barang cetak dan penggandaan, serta pembuatan spanduk untuk kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Dianggarkan dana sebesar Rp. 3.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.880.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 90,14% dan realisasi fisik 100% Kegiatan ini berupa tagihan bahan bacaan berupa koran baik harian maupun mingguan, sehingga pegawai dapat menikmati bahan bacaan di kantor.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dianggarkan dana sebesar Rp. 120.518.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.277.276,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,14% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, dan luar provinsi.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dianggarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 83,33% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembelian 2 bh printer canon.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Dianggarkan dana sebesar Rp. 38.481.908,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.412.400,- Presentase realisasi anggaran sebesar 32,26% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran tagihan air, listrik dan telepon.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.516.754.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.489.343.156,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,19% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak, honor daerah serta pembayaran tagihan JKK dan JKM.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dianggarkan dana sebesar Rp. 123.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 117.504.450,- Presentase realisasi anggaran sebesar 95,53% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran pajak, pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 dan roda 6 (non hidrolik).

- 2) Pemeliharaan Mebel
Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan mobiler (terkait dengan pegawai).
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 990.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 36,94% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa instal komputer.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dianggarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.952.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 99,52% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan dan perawatan gedung kantor.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
Anggaran sebesar Rp. 550.271.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 546.076.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,24% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya patroli / monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 40 kali, penegakan disiplin ASN sebanyak 10 kali, penertiban kekayaan daerah sebanyak 10 kali, Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 22 kali kegiatan, penertiban penegakan Disiplin anak sekolah sebanyak 20 Kali penertiban dan Pengamanan Natal / operasi lilin singgalang 2022 berjumlah 9 hari kegiatan.
 - Pada tahun ini juga dilaksanakan penempatan BKO Kecamatan berdasarkan surat Perintah Kasat Pol. PP & Damkar sebanyak 10 Kecamatan yang terdiri atas 2 orang per Kecamatan dengan jumlah 20 orang dengan tugas utama penertiban /penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2023. sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim
 - Terlaksananya juga pengamanan (Piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan personil berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat.
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Anggaran sebesar Rp. 30.772.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.597.750,-

persentase realisasi anggaran sebesar 99,43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebanyak 18 kali kegiatan dan Operasi Warung Kelambu (WAR KEL) pada bulan suci Ramadhan berjumlah 8 kali kegiatan.

3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota

Anggaran sebesar Rp. 127.196.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.921.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 45,54% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan peninjauan terkait dengan daerah yang akan rawan dengan longsor, banjir maupun kayu tumbang, kita juga telah memetakan titik-titik lokasi yang rawan akan terjadi bencana.
- Berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun nagari agar cepat memberikan informasi apabila terjadi bencana maupun kegiatan-kegiatan yang memicu konflik baik sosial, budaya, politik.
- Telah dilakukan penanggulangan bencana alam yang terjadi di beberapa titik lokasi seperti banjir bandang pasar lama dan tampang yang mana banyak merendam rumah tangga.
- Selanjutnya banjir dan tanah longsor di Kecamatan Dua Koto, Mapat Tunggul, dan Mapat Tunggul Selatan serta juga melakukan upaya Perlindungan Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.549.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,51% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan monitoring ke tiap nagari guna menunjang peran Satlinmas di dalam Nagari.
- Kemudian kita Juga melibatkan Satlinmas Nagari untuk upaya penanggulangan bencana alam di Kec. Lubuk Sikaping, Dua Koto, Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan.
- Serta juga ikut sertakan peran Satlinmas dalam pemantauan situasi menjelang pemilu serentak 2024, agar dapat segera mungkin memberikan informasi guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran sebesar Rp. 49.460.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.986.950,- persentase realisasi anggaran sebesar 97,02% dan realisasi fisik sebesar 99,19%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan koordinasi dengan Satpol. PP Provinsi dan Kab/Kota di Sumbar serta dengan Satpol. PP Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkait batas wilayah tentang Trantibum dan Penegakan Perda di daerah terpencil.

- Terlaksananya peningkatan SDM personil Pol. PP guna untuk meningkatkan kinerja Satpol. PP yang lebih profesional di lapangan dengan tata cara yang baik melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkala.
- 6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada Anggaran sebesar Rp. 1.839.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 81,59% dan realisasi fisik sebesar 91,84%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
- Telah memberikan layanan optimal baik informasi maupun penegakan dalam penegakan perda
 - Telah memberikan sosialisasi terkait dengan dampak penegakan Perda
 - Telah melaksanakan kunjungan ke tiap-tiap kecamatan guna koordinasi dengan Kasi Trantibum terkait dengan layanan dampak penegakan perda itu sendiri.
 - Tersedia dana pada TW 1 –TW 3 kemudian pada TW. IV anggaran di geser ke kegiatan lain karena dana pada kegiatan ini tidak terpakai maksimal karena dalam tahun 2023 tidak terdapat ganti rugi maupun layanan dampak dari penegakan Perda/Perbup itu sendiri.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 Anggaran sebesar Rp. 1.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.630.200,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,40% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah untuk tahun ini kurang terlaksananya sosialisasi penegakan Perda dan Perbup dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 37.498.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.455.100,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,88% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dengan menertibkan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjumlah 30 kali kegiatan, Izin usaha Warung Internet (WARNET) dan Izin Usaha Depot Air Minum dengan jumlah keseluruhan 8 Kali kegiatan, Pajak Reklame, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah keseluruhan 15 Kali kegiatan, kegiatan tersebut terlaksana sampai bulan Desember 2023.
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 39.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.859.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,38% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Telah dilaksanakan penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dalam upaya cipta kondisi kenyamanan di tengah masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Telah dilakukan penugasan operasi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Pemda Kab. Pasaman
- Telah dilakukan operasi tertib tempat hiburan di wilayah pemerintahan Kab. Pasaman.
- Telah melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda yang terdapat di tempat hiburan seperti wanita-wanita yang terjaring dalam operasi 3 pilar yang mana telah dikirim ke pusat panti rehabilitasi Andam Dewi guna untuk efek jera.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 29.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.462.250,- persentase realisasi anggaran sebesar 89,04% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.
 - Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.
 - Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.
 - Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.
 - Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp.632.491.000,- dengan realisasi sebesar Rp.589.894.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 93,27% dan realisasi fisik sebesar 99,99%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 38 kali di Kabupaten Pasaman.
- 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran Anggaran sebesar Rp.9.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.844.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 52,25% dan realisasi fisik sebesar 86,45%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Panti dan Padang Gelugur.
 - Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 104 kali dan pemotongan cincin 2 kali.

- 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Anggaran sebesar Rp.21.183.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.834.300,-
persentase realisasi anggaran sebesar 70,03% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
- Terlaksananya pelatihan pencegahan kebakaran dini terhadap 20 kk dengan jumlah peserta 40 orang
 - Masyarakat mengerti dan paham akan cara penanggulangan dini kebakaran

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Anggaran sebesar Rp.12.765.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.954.000,-
persentase realisasi anggaran sebesar 85,81% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
- Terlaksananya pengecekan sarana dan prasarana secara rutin.
 - Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak berfungsi.

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Anggaran sebesar Rp.13.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.007.500,-
persentase realisasi anggaran sebesar 92,29% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
- Diketahui penyebab terjadinya kebakaran
 - Diketahui jumlah korban dari kebakaran yang terjadi
 - Diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban kebakaran

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Anggaran sebesar Rp.5.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.213.000,-
persentase realisasi anggaran sebesar 3,69% dan realisasi fisik sebesar 12,51%.
Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Telah dilaksanakan pelatihan penanggulangan dini kebakaran bagi masyarakat sebanyak 15 orang
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran anggaran sebesar Rp.12.499.100,- dengan realisasi sebesar Rp.10.427.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 83,42% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : terbentuknya relawan pemadam kebakaran di nagari-nagari sebanyak 40 orang.

Dari program/kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (Indikator Sasaran Renstra SKPD)
Urusan Wajib Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	kasus	30 kasus	30 kasus	100 %
2.	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	kasus	20 kasus	20 kasus	100 %
3.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100 %
4.	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	62 dokumen	62 dokumen	100 %
5.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	50 orang	30 orang	60 %
6.	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	laporan	25 laporan	5 laporan	20 %
7.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepa	laporan	1 laporan	1 laporan	100 %

	da masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku/ usaha				
8.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	laporan	20 laporan	20 laporan	100 %
9.	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	laporan	55 laporan	55 laporan	100 %
10.	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	dokumen	35 dokumen	35 dokumen	100 %
11.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
12.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %
13.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	20 keluarga	20 keluarga	100 %
14.	Jumlah dokumen yang memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100 %
15.	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100 %
16.	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi	orang	40 orang	15 orang	37,5 %

	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya				
17.	Jumlah nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	orang	40 orang	40 orang	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat semua kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa indikator yang tidak tercapai dikarenakan ada faktor pengurangan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dimana semua kegiatan pada Satpol. PP dan Damkar mendukung untuk pencapaian kinerja.

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pada tahun 2023 ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, masalah tersebut antara lain :

- Kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan.
- Anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif.
- Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.
- Rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.
- Kurangnya posko Pemadam Kebakaran dan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman telah mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain:

- Diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi)
- Penambahan anggaran operasi dan penertiban
- Penambahan PNS untuk Satpol PP dan Damkar.
- Adanya pelatihan atau diklat dan penambahan anggaran.

- Penambahan posko Pemadam Kebakaran sehingga respon time 15 menit dapat terlaksana dan penambahan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu Tahun Anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penempatan Polisi Pamong Praja Bawah Kendali Operasi Kecamatan di 10 kecamatan Kabupaten Pasaman	Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran nomor : 300/09/Satpol. PP dan Damkar/2023 tanggal 3 Januari 2023	Penertiban / penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk melakukan operasi terhadap penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat	Telah kami lakukan operasi terhadap Penyakit Masyarakat yang ada dikabupaten Pasaman antara lain :	
		1. Penertiban Pengunjung Hotel yang bukan Suami Istri	a. Selama tahun 2023 ada beberapa kali dilakukan penertiban pengunjung Hotel yang bukan suami istri diantaranya Hotel Anugrah dan ini sudah

			<p>sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga perlu dilakukan penertiban agar tidak terjadi lagi dimana pengunjung bukan suami istri yang menginap disana</p> <p>b. Pada akhir tahun kami melakukan Operasi Penertiban Hotel agar terjadinya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lubuk Sikaping aman</p>
		<p>2. Penertiban Minuman Keras seperti Tuak</p>	<p>Telah sering dilakukan penertiban Miras di Kabupaten Pasaman karena banyaknya laporan dari masyarakat bahwa semakin banyaknya tempat penjualah miras terutama di Kecamatan Panti, Rao dan Tigo Nagari sehingga membuat resah masyarakat sekitar. Bagi yang kedapatan pada saat Operasi penertiban tersebut kami berikan Sanksi lisan dan tegur secara tertulis</p>
		<p>3. Penertiban Café yang menyediakan Wanita Penghibur (PSK)</p>	<p>Banyaknya pengaduan masyarakat tentang banyaknya Wanita malam di Café Dua Koto dan Rimbo Panti seperti wanita-wanita yang terjaring dalam operasi 3 pilar yang mana di kirim ke pusat panti rehabilitasi Andam Dewi guna efek jera.</p>
		<p>4. Penertiban Muda mudi yang berbuat maksiat di tempat- tempat tertentu</p>	<p>semakin maraknya muda mudi yang pacaran di tempat-tempat umum (Gelora, Gor dan Atrium</p>

			ruko) sehingga sangat meresahkan warga setempat dan bagi muda mudi yang dapat pada operasi tersebut kami bawa kantor dan proses sesuai prosedur yang ada
--	--	--	--

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan..... **(nihil)**
- 4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian..... **(nihil)**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2023 masih terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang tidak bisa diatasi sendiri oleh Satpol PP dan Damkar antara lain masalah kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif, kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.

B. SARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar pada tahun 2024 diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi), penambahan anggaran operasi dan penertiban, penambahan PNS untuk Satpol PP dan Damkar serta adanya pelatihan atau diklat untuk aparat Pol. PP, kurangnya posko Pemadam Kebakaran sehingga respon time 15 menit tidak terlaksana dan penambahan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran mengingat beban kerja untuk kedepannya semakin berat. Dengan demikian, Satpol PP dan Damkar dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini di sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, Januari 2024
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP.19830415 200212 1 001

3.1.2 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.962.290.459	4.789.292.504	96,51			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.867.500	10.792.500	99,31			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.952.500	99,05			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.867.500	5.840.000	99,53			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.942.747.751	2.837.094.622	96,41			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.787.751	2.734.934.622	96,89			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.960.000	102.160.000	85,16			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.820.000	153.830.600	98,09			
				Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156.000.000	153.830.600	98,61			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	820.000	0	0,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.439.300	153.372.776	98,04			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000	4.907.000	96,98			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.776.500	10.588.500	98,26			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	16.889.000	16.720.000	99,00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perakitan Perundian - Undangan	3.195.000	2.880.000	90,14			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.518.800	118.277.276	98,14			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	2.500.000	83,33			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.500.000	83,33			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.235.908	1.501.755.556	96,56			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.481.908	12.412.400	32,26			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.754.000	1.489.343.156	98,19			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.180.000	129.946.450	94,73			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.000.000	117.504.450	95,53			
				Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.500.000	100,00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.680.000	990.000	36,94			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.952.000	99,52			
				Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	875.277.600	798.576.500	91,24			
				Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	796.639.000	720.631.700	90,46			
				Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	550.271.200	546.076.000	99,24			
				Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	30.772.500	30.597.750	99,43			
				Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan keterlibatan umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	127.196.000	57.921.500	45,54			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	37.100.000	36.549.000	98,51			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	49.460.300	47.986.950	97,02			
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1.839.000	1.500.500	81,59			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	78.638.600	77.944.800	99,12			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.640.000	1.630.200	99,40			
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	37.498.600	37.455.100	99,88			
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	39.500.000	38.859.500	98,38			
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan non Kebakaran	736.713.100	669.636.050	90,90			
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	692.664.000	636.034.550	91,82			
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.720.000	26.462.250	89,04			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	632.491.000	589.894.000	93,27			
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	9.270.000	4.844.000	52,25			
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	21.183.000	14.834.300	70,03			
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.765.000	10.954.000	85,81			
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.765.000	10.954.000	85,81			
				Investigasi Kejadian Kebakaran	13.010.000	12.007.500	92,29			
				Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	13.010.000	12.007.500	92,29			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	18.274.100	10.640.000	58,22			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5.775.000	213.000	3,69			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	12.499.100	10.427.000	83,42			
				JUMLAH	6.574.281.159	6.257.505.054				

Lubuk Sikaping, Januari 2024
 KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19830415 200212 1 001